

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Umum merupakan salah satu momen penyaluran aspirasi bagi Masyarakat terhadap Pemerintah. Pada Pemilihan Umum, Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan orang yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan juga memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif dalam masa jabatan lima Tahun. Perubahan-perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Berbagai proses demokrasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah<sup>1</sup>.

Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, kehidupan demokrasi juga berlangsung di Sumatera Barat (Sumbar), yaitu: pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada Tahun 2013. Terdapat beberapa implikasi dari perubahan Politik pada tingkat lokal antara lain jika pada Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih dan ditunjuk langsung dari pusat. maka setelah Tahun 2004 Kepala Daerah dipilih langsung oleh Masyarakat Daerah setempat<sup>2</sup>. Tentunya dalam pelaksanaannya akan sangat jauh berbeda apabila dilihat dari teknis dan prosedur dengan yang sebelumnya. Dengan Pilkada langsung ini Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut andil dalam pesta Demokrasi Negara sebagai bentuk partisipasi aktifnya dibidang politik. Bukan hanya itu, setiap kandidat kepala daerah mengoptimalkan sosialisasi dengan Masyarakat agar mereka dapat menyuarakan visi misi

---

<sup>1</sup> Martin Jimung. *Partai Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. 2005. Hlm 24

<sup>2</sup> Sebagaimana perubahan Undang-undang pemerintahan daerah dari UU No. 22 Tahun 1999 ke UU No. 32 Tahun 2004.

serta program kerja yang akan dilaksanakan dengan harapan Masyarakat akan lebih rasional untuk memilih mana kandidat yang cocok menjadi Kepala Daerah nantinya.

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Setiap keputusan Politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Masyarakat maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan Politik<sup>3</sup>

Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk Partisipasi Politik aktif yang seringkali dilakukan oleh Masyarakat di daerah dibandingkan dengan Partisipasi Politik lain. Kegiatan Partisipasi Politik, meskipun kelihatannya hanya menyangkut soal pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye<sup>4</sup>. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan Kepala Eksekutif Daerah melalui Pemilihan langsung (Pilkada Langsung)<sup>5</sup> maka diadakanlah pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2005. Pada Pilkada langsung ini Masyarakat diberi andil besar untuk memberikan hak pilihnya sebagai bentuk Partisipasi dalam bidang politik yang membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilihan Kepala Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Padang secara langsung sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya pada Tanggal 30 Oktober 2013. Adapun hasil Pilkada tersebut di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**JumlahSuara SahPemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013Pada Putaran Pertama**

<sup>3</sup>Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo, 1992, hal.140

<sup>4</sup>Yolvena Miaz. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang:UNP Press. 2012.hlm 20

<sup>5</sup> Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaualatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih secara langsung Kepala dan Wakil Kepala daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah kabupaten, masyarakat dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati, pada wilayah kota, masyarakat dapat memilih calon Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam wilayah propinsi, masyarakat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemilihan secara langsung tersebut tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah yang diberikan dari pusat kepada daerah.

No.	Nama Calon walikota dan wakil walikota Padang 2013	Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Emma Yohana-Wahyu Iramana Putra	Golkar-PBB	25.589	8,17 %
2	M.Ichls El Qudsi-Januardi Sumka	PAN-P. Demokrat	48.749	15,56 %
3	Desri Ayunda-James Helywar	PDIP- Hanura	59.845	19,11 %
4	Asnawi Bahar-Surya Budi	Independen	12.626	4,03 %
5	Ibrahim-Nardi Gusman	Independen	14.845	4,74 %
6	Kandis Asrin-Hendra Dwipa	Independen	13.762	4,39 %
7	Maigus Nasir-Armalis M	Independen	36.465	11,60 %
8	Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi	Independen	4.470	1,43 %
9	Syamsuar Syam-Mawardi Nur	Independen	4.616	1,47 %
10	Mahyedi Ansyarullah-Emzalmi	PKS-PPP	92.214	29,45 %
	Jumlah		<b>313.181</b>	<b>70,50 %</b>

Sumber: KPU Kota Padang tahun 2013

Berdasarkan data perolehan suara pilkada Kota Padang Tahun 2013 di atas terlihat bahwa Pilkada putaran pertama dimenangkan oleh pasangan Mahyeldi dan Desri Ayunda dengan perolehan suara 92.214 dan 59.845. Namun jika dilihat dalam bentuk persentase, perolehan suara kedua pasangan ini hanya mencapai 29,45 % dan 19,11 %, belum lebih dari 30 %, maka dilakukan Pemilihan Umum putaran kedua. Sehingga KPU Kota Padang melakukan penjadwalan untuk memilih Walikota Dan Wakil Walikota Kota Padang dilakukan pada putaran ke dua pada tanggal lima Maret Pada Tahun 2014.

**Tabel 1.2**

**Hasil Perolehan Suara sah Pilwako Padang Tahun 2013 Putaran Pertama di Kecamatan Bungus Teluk Kabung**

No	Nama Calon	Jumlah Suara Sah	Persentase
1	Emma Yohana-Wahyu Iramana Putra	1.377	(14,11%)
2	M.Ichls El Qudsi-Januardi Sumka	1.682	(17,24%)
3	Desri Ayunda-James Helywar	509	(5,22%)
4	Asnawi Bahar-Surya Budi	266	(2,73%)
5	Ibrahim-Nardi Gusman	1.644	16,85%)
6	Kandis Asrin-Hendra Dwipa	241	(2,47%)
7	Maigus Nasir-Armalis M	1.764	(18,08%)
8	Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi	148	(1,52%)
9	Syamsuar Syam-Mawardi Nur	245	(2,51%)
10	Mahyedi Ansyarullah-Emzalmi	1.881	(19,28 %)

Sumber: KPU Kota Padang tahun 2013

Jika dilihat dari perolehan suara sah pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 pada putaran pertama di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang menjadi

pemenangnya adalah Mahyeldi dan Emzalmi dan disusul oleh pasangan Maigun Nasir dan Armalis. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh tentang Partisipasi Politik Masyarakat yang ada di kecamatan Bungus Teluk Kabung tersebut. Untuk itu peneleneleti menggali lebih jauh tentang Partisipasi Politik Masyarakat yang ada di kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Pilkada Kota Padang pada putaran kedua Pada Tahun 2014. Penggunaan hak pilih di Kota Padang secara lebih terperinci berdasarkan wilayah Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Suara Sah Pemilihan Walikota Dan Wakilwali**  
**Kota Padang Tahun 2013 Atau 2014 Pada Putaran Pertama Dan Putaran Kedua Di**  
**Seluruh Kecamatan**

Kecamatan	DPT	Suara sahdalam Putaran I	%	Suara sah dalam Putaran 2	%	% Perbandingan
Bungus Teluk Kabung	<b>15.929</b>	<b>10.315</b>	<b>64,76</b>	<b>8.996</b>	<b>56,48</b>	<b>8,28</b>
<b>Koto Tangah</b>	113.047	63.427	56,11	60.485	53,50	2,61
<b>Kuranji</b>	87.262	49.071	56,23	45.916	52,62	3,61
<b>Lubuk Begalung</b>	71.844	41.335	57,53	39.084	54,40	3,14
<b>Lubuk Kilangan</b>	32.028	18.020	56,26	17.566	54,85	1,41
<b>Nanggalo</b>	36.996	21.383	57,80	19.381	52,39	5,41
<b>Padang Barat</b>	32.307	17.266	53,44	16.112	49,87	3,57
<b>Padang Selatan</b>	41.222	23.019	55,84	22.191	53,83	2,01
<b>Padang Timur</b>	54.906	28.720	52,31	27.220	49,58	2,73
<b>Padang Utara</b>	37.274	20.014	53,69	18.746	50,29	3,4
<b>Pauh</b>	37.470	21.794	58,16	20.333	54,26	3,9
<b>Total</b>	<b>560.285</b>	<b>314.315</b>		<b>296.030</b>		
Presentase (%)			<b>56,00%</b>		<b>52,84</b>	<b>%</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang Tahun 2014

Jika dibandingkan antara putaran pertama dan kedua pada pilkada kota Padang tahun 2013 Terjadi Trend penurunan tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang. Pada putaran pertama masyarakat yang memilih

ada 56% dari jumlah pemilih yakni 560.285 pemilih dan yang ikut memilih hanya 314.315 pemilih Sementara pada putaran ke dua masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 296.030 pemilih atau sama dengan 52,84% dari jumlah pemilih tetap. Pada dasarnya Trend penurunan jumlah pemilih Penjelasan di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Selisih pilkada Kota Padang Tahun 2008 dan 2014**

No.	Pemilihan Kepala Daerah	DPT	Suara Sah		Selisih		Persentase	
			Put. 1	Put. 2	Put 1 dan Put 2	Put. 1	Put. 2	
1	Pilkada 2013/2014	560.285	314.315	296.030	- 18.285	56	52,84	
	Selisih		+ 8.934	- 9.351				

*Sumber : KPU Kota Padang (data olahan peneliti)*

Sedangkan jika dilihat pada pilkada putaran kedua Tahun 2014 terjadi penurunan angka Partisipasi Masyarakat Kota Padang putaran pertama dengan putaran kedua yang dapat dilihat dari perolehan suara sah yaitu sebesar 314.315 menjadi 296.030, dengan jumlah penurunan sebesar 18.285 suara. Idealnya dengan bertambahnya DPT hendaknya perolehan suara juga meningkat pada putaran kedua, akan tetapi terjadi penurunan suara. Kemenangan pasangan ini tentu tidak luput dari Partisipasi Masyarakat untuk memilih pasangan ini pada pilkada. Jumlah suara yang signifikan menjadi tolak ukur penentuan bagi siapa yang berhak memimpin pemerintahan lima tahun ke depan. Adapun Partisipasi Masyarakat dalam pemberian suara merupakan suatu bentuk perilaku memilih yang dilandasi oleh berbagai faktor, baik itu interen dan eksteren yang nantinya akan mempengaruhi perolehan suara. Faktor interen berupa kesadaran sendiri atas dasar kualitas dan kapabilitas yang dimiliki kandidat dan faktor eksteren berupa lingkungan dan status sosial (tingkat ekonomi, pendidikan, dll).

Namun, selama ini Partisipasi Politik hanya terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum ataupun Pilkada. Partisipasi Politik yang lebih

penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya kedalam sebuah institusi formal. Meskipun tersedianya jaminan dan mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2014 ada yang tidak ikut memberikan hak suaranya sebagai mana yang terjadi Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

McClousky<sup>6</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilihan umum yaitu:

1. Bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik
2. Karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil.
3. Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidak ikut sertaan merupakan hal yang terpuji.

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa yang terjadi penurunan jumlah pemilih di Kecamatan Bugus Teluk Kabung sebesar 8,28%. Maka Peneliti Tertarik Untuk Mengkaji Mengapa Partisipasi Politik Masyarakat Khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang cenderung menurun.

## **B. Perumusan Masalah**

Bila kita lihat tabel pada latar belakang diatas maka penurunan angka Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Walikota Padang di putaran kedua menampilkan angka yang cukup signifikan dari penurunan jumlah pemilih di kecamatan Bungus Teluk Kabung sebesar 8,28%. Maka dari permasalahan di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Mengapa Partisipasi Masyarakat khususnya Bungus Teluk Kabung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2014 cenderung menurun dari putaran 1 ke putaran II?

---

<sup>6</sup>Mirim Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai. PT.Gramedia:Jakarta1981,hal:5

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian Pada Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang khususnya Bungus Teluk Kabung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2014, yakni

1. Untuk mengetahui Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang Khususnya Bungus Teluk Kabung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2014.

### **D. Signifikan Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain mengenai Partisipasi Politik pada pemilu kada.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan peningkatan terhadap perilaku memilih kepada Masyarakat. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini akan menjadi input bagi pemerintah dan khususnya bagi KPU ataupun KPUD, agar memperhatikan dan membantu masyarakat dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

#### **3. Manfaat Sosial**

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru yang berguna bagi Masyarakat. Sehingga Masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak pilihnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan di lakukan oleh Febriandy<sup>7</sup> yang berjudul hubungan keaktifan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus dengan Partisipasi Mahasiswa Unand dalam politik praktis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara keaktifan Mahasiswa Unand dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus dengan Partisipasi Mahasiswa Unand dalam politik praktis adapun hasil penelitian ini. Hasil data penelitian lapangan diperoleh bahwa, 55% dari seluruh responden memilih untuk berpartisipasi dalam politik praktis dan 45% memilih untuk tidak terlalu aktif berpartisipasi dalam politik praktis.

Penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Syafraini<sup>8</sup> yang berjudul Partisipasi Politik Mahasiswa Fisip Unand Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Pada Tahun 2005 yang tujuannya untuk untuk mengetahui hubungan antara tingkat prestasi belajar mahasiswa dengan tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui hubungan Antara Tingkat Keaktifan Berorganisasi Mahasiswa Dengan Tingkat Partisipasi Politiknya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2005.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Oktora Ristya Nanda<sup>9</sup> yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Tentang Tingkat Partisipasi Politik LSM KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat).

---

<sup>7</sup>Febriandy (00193035) " Hubungan Keaktifan Mahasiswa Dalam organisasi kemahasiswaan intra Kampus dengan Partisipasi Mahasiswa Unand dalam Politik praktis " *Skripsi Ilmu Politik Unand Fisip*.2007

<sup>8</sup>Syafraini (01119304) " Partisipasi Politik mahasiswa Fisip unand pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra barat pada tahun 2005 " *Skripsi Ilmu Politik Unand Fisip*.2006

<sup>9</sup>Oktora Ristya Nanda(03193001) tingkat partisipasi politik lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kebijakan publik Studi Kasus Tentang Tingkat Partisipasi Politik LSM KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Proses Perumusan Perda Provinsi Sumbar No.11/2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat *skripsi ilmu politik unand fisif*.2007



Dalam Proses Perumusan Perda Provinsi Sumbar No.11/2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Tujuan penelitian yang mendeskripsikan tingkat partisipasi politik LSM KPI dan LP2M dalam proses perumusan perda pencegahan dan pemberantasan maksiat serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi, membuat peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori yaitu teori partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, teori kelompok kepentingan, dan teori kebijakan publik.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Sekarang dan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Teori dan Konsep	Metode Penelitian	Informan	Hasil Penelitian
1	Febriandy	Hubungankeaktifan mahasiswa dalamorganisasi kemahasiswaan intrakampus dengan partisipasi mahasiswa unand dalam politik praktis	Partisipasi politik	Kuantitatif	Mahasiswa	Hasil data penelitian lapangan diperoleh bahwa, 55% dari seluruh responden memilih untuk berpartisipasi dalam politik praktis dan 45% memilih untuk tidak terlalu aktif berpartisipasi dalam politik praktis



2	Syafraini.	Partisipasi politik mahasiswa fisif unand pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatra barat pada tahun 2005	Partisipasi politik	kuantitatif mahasiswa	dari 48 orang responden yang memiliki tingkat prestasi belajar rendah 44 orang diantaranya memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah sekali, 3 orang diantaranya memiliki tingkat partisipasi politik sangat rendah, dan 1 orang memiliki tingkat partisipasi politik sedang. Dan yang terakhir dari 15 orang responden yang memiliki tingkat prestasi belajar sedang 10 diantaranya memiliki tingkat keaktifan berorganisasi yang sangat rendah sekali dan 5 orang lagi memiliki tingkat partisipasi politik sangat rendah.	
3	OktoraRistya Nanda	Tingkat partisipasi politik lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kebijakan publik Studi Kasus Tentang Tingkat Partisipasi Politik LSM KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Proses Perumusan Perda Provinsi Sumbar No.11/2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Partisipasi politik	Kualitatif	LSM KPI LSMLP2M DPRD Provinsi Sumbar	tingkat partisipasi politik LSM KPI berada pada tingkat "Pembuatan Keputusan Bersama", hal ini ditandai dengan hadirnya KPI pada saat ranperda disahkan menjadi perda provinsi Sumbar no.11/2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat. Sedangkan LP2M berada pada tingkatan "Kolaborasi" ditandai dengan tidak hadirnya

## B. Kerangka Teori dan konsep

### 1. Partisipasi Politik

Menurut Michael Rush Dan Philip Altoff dalam buku Sosiologi Politik adalah memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktifitas politik dan yang tertinggi partisipasi politik adalah yang menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan yang terendah dari suatu partisi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melalukan aktivitas politik secara total<sup>10</sup>.

Menurut Gabriel A. Almond dalam buku perbandingan sistim politik yang di sunting oleh Mas'ood dan Macandrews (1981) Almond<sup>11</sup> membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

**Tabel 2.2**

**Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik Almond**

Konvensional	Nonkonvensional
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemungutan suara</li><li>• Diskusi politik</li><li>• Kegiatan pemilihan</li><li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li><li>• Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan petisi</li><li>• Demonstrasi</li><li>• Konfrontasi</li><li>• Mogok</li><li>• Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, dan pembakaran)</li><li>• Tindak kekerasan politik</li></ul>

<sup>10</sup>Damsar, *pengantar sosiologi politik*, kencana: jakarta. 2010. hlm: 185

<sup>11</sup>*Ibid*, Damsar, hlm: 186

- 
- terhadap manusia (penculikan pembunuhan)
- Perang gerilya dan revolusi
- 

Sedangkan menurut Samuel P Huntington dan Joan M Nelson dalam *No easy choice: Political participation in developing countries*: partisipasi politik adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual maupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal ataupun ilegal, dan efektif atau tidak”<sup>12</sup>. Partisipasi politik kolektif ini pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional, seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai bangunan umum dan huru-hara. Dan dari konsep diatas maka peneliti melihat fenomena yang terjadi dari partisipasi kolektif yang konvensional yaitu kegiatan dalam proses pemilihan umum<sup>13</sup>.

Partisipasi Politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku Partisipasi Politik sebagai berikut :

- Kegiatan pemilihan*, mencakup suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai politik, sebuah bunga rampai*, PT.Gramedia: jakarta, 1981, Hal:2

<sup>13</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta : Jakarta. 1994. Hlm:16-18

- c. *Kegiatan organisasi*, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. *Mencari koneksi (Contacting)*, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. *Tindak kekerasan (Violence)*, merupakan tindakan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

## **2. Alasan Partisipasi Politik**

Max weber<sup>14</sup> mengemukakan empat pandangan orang melakukan aktivitas politik sebagai berikut:

- a. Alasan rasional yaitu: alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
- b. Alasan emosional efektif yaitu: alasan yang didasarkan atas kecintaan atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu.
- c. Alasan tradisional yaitu: alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial.
- d. Alasan rasional instrumental yaitu: alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi ataupun suatu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.

---

<sup>14</sup>Op.Cit.Damsar.2010.Hal 193-197

McClousky<sup>15</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam Pilkada yaitu ;

1. Bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik
2. Karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil.
3. Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.

Sedangkan menurut Hari Soegiman<sup>16</sup> berpendapat ada tujuh alasan orang yang mempunyai hak pilihnya tidak ikut dalam Pilkada yaitu:

- a. karena alasan meninggal dunia.
- b. Karena sakit keras
- c. Karena melakukan tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak pilihnya.
- d. Alasan kemanusiaan dan sedang dalam perjalanan.
- e. Pindah alamat tanpa disertai administrasi yang baik.
- f. Ikut mencoblos tetapi salah tusuk, kertas rusak.
- g. Sengaja tidak ikut mencoblos dengan alasan yang tidak jelas.

Eep Saifullah Fatah<sup>17</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilihnya tidak ikut dalam Pilkada yaitu:

1. Golput teknis yaitu mereka yang kena sebab-sebab teknis tertentu menjai golput.
2. Golput teknis politis yaitu kesalahan teknis dari KPU atau diri sendiri.
3. Golput politis yaitu mereka yang mersa tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

<sup>15</sup> *Op. Cit.* Miriam Budiardjo.1981. Hal 5.

<sup>16</sup> Arbi Sanit, *golput aneka pandangan fenomena politik*, pustaka sinar harapan: jakarta. 1992. hal:280

<sup>17</sup> Abdurrahman Wahid, Dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, Sagon: Solo. 2009. hlm:64

4. Golput ideologis yaitu mereka yang tidak percaya pada mekanisme Demokrasi.

Sedangkan menurut Gandung Ismanto<sup>18</sup> berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang mempunyai hak pilihnya tidak ikut dalam Pilkada yaitu:

- a. Apatisme politik yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelembagaan.
- b. Sinisme politik yaitu sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga.
- c. Alienasi yaitu perasaan yang keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintah, sehingga memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.
- d. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup> Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 dikatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Dipilih Secara Demokratis. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1 bahwa: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>18</sup>Ibid, Abdurrahman Wahid, Dkk, hlm: 100-101

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 ayat 1.

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” dan ayat 2 “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. Partai politik atau gabungan Partai Politik (koalisi) yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memiliki minimal 15% kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan<sup>20</sup>. Dalam Pemilihan Kepala Daerah pasangan calon terpilih memperoleh suara sah 30% dari suara sah yang ditetapkan apabila tidak ada calon Kepala Daerah yang memperoleh suara 30% maka diadakan pemilihan Kepala Daerah Putaran ke dua yang diikuti calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan ke dua pada putaran pertama, calon Kepala Daerah yang lebih dari 50% dari jumlah suara sah pada putaran kedua maka ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih<sup>21</sup>

### C. Skema Pemikiran Dalam Penelitian

#### Bagan 2.2 Skema Pemikiran

Pemilukada kota padang tahun 2013

Terjadi dua putaran dikarenakan tidak ada salah satu kandidat yang mendapat perolehan suara 30%

Putaran I Tahun 2013 tanggal 30 oktober 2013

Putaran II tahun 2014 tanggal 5 maret 2014

<sup>20</sup>Peraturan  
Pengang

pemilihan, Pengesahan

<sup>21</sup>Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Pasal 109.



↓

Terjadinya penurunan angka Partisipasi politik antara putaran I dan II dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2013 dan 2014 yaitu di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yakni sebesar 8,28%

↓

Hari Soegiman alasan karna tidak ikut memilih:

- karena alasan meninggal dunia.
- Karena sakit keras.
- Karena melakukan tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak pilihnya.
- Alasan kemanusiaan dan sedang dalam perjalanan.
- Pindah alamat tanpa disertai administrasi yang baik.
- Ikut mencobos tetapi salah tusuk, kertas rusak.
- Sengaja tidak ikut mencoblos dengan alasan yang tidak jelas

↓

Mengapa partisipasi masyarakat khususnya Bungus Teluk Kabung pada pilkada kota padang tahun 2014 cenderung menurun dari putaran I ke putaran II

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>22</sup>. Sedangkan menurut Masri Singarimbun.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk:

---

<sup>22</sup>Lexy Moleong, *Metoda Penelitian Kualitatif*. 1997. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya hlm 3

- a. Mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau dalam frekwensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
- b. Mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial.

Definisi tentang metode penelitian sangat bervariasi, namun demikian diantara sekian metode penelitian yang ada biasanya dikategorikan menjadi beberapa bagian, misalnya menurut Sugiyono<sup>24</sup>, metode penelitian dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan tujuan, pendekatan tingkat esalisasi dan jenis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bungus. Alasan memilih lokasi ini karena Kecamatan Bungus merupakan banyak masyarakat yang menggunakan Hak Pilihnya Dalam pemilihan kepala Daerah Kota Padang pada Tahun 2014 Untuk itulah peneliti ingin meneliti penelitiannya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung di bandingkan dengan Kecamatan yang lain Di Kota Padang Tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Suara Sah Pemilihan Walikota Dan Wakilwali**  
**Kota Padang Tahun 2013 Atau 2014 Pada Putaran Pertama Dan Putaran Kedua Di**  
**Seluruh Kecamatan**

Kecamatan	DPT	Suara sah dalam Putaran I	%	Suara sah dalam Putaran 2	%	% Perbandingan
Bungus Teluk Kabung	<b>15.929</b>	<b>10.315</b>	<b>64,76</b>	<b>8.996</b>	<b>56,48</b>	<b>8,28</b>
Koto Tangah	113.047	63.427	56,11	60.485	53,50	2,61
Kuranji	87.262	49.071	56,23	45.916	52,62	3,61
Lubuk Begalung	71.844	41.335	57,53	39.084	54,40	3,14
Lubuk Kilangan	32.028	18.020	56,26	17.566	54,85	1,41
Nanggalo	36.996	21.383	57,80	19.381	52,39	5,41
Padang Barat	32.307	17.266	53,44	16.112	49,87	3,57

<sup>23</sup>Singarimbun Masri, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm.4

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Sinar Baru, Bandung, 1996, hlm. 3.

<b>Padang Selatan</b>	41.222	23.019	55,84	22.191	53,83	2,01
<b>Padang Timur</b>	54.906	28.720	52,31	27.220	49,58	2,73
<b>Padang Utara</b>	37.274	20.014	53,69	18.746	50,29	3,4
<b>Pauh</b>	37.470	21.794	58,16	20.333	54,26	3,9
<b>Total</b>	<b>560.285</b>	<b>314.315</b>		<b>296.030</b>		
Presentase (%)			<b>56,00</b>		<b>52,84%</b>	

*Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang Tahun 2014*

### **C. Peranan Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti berperan sangat dominan karena peneliti adalah instrument utama, selain itu posisi peneliti berada di luar lembaga unsur. Pada penelitian ini, peneliti melakukan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan objek yang akan diteliti, dengan tetap berada di luar realitas lingkungan sosial yang akan diteliti. Kemudian dari pada itu peneliti berada langsung di lapangan, secara langsung terjun dan bersentuhan dengan berbagai aktivitas.

Peneliti mulai melakukan penelitian setelah mendapat surat izin dari kampus pada tanggal 06 Maret Tahun 2015 dengan surat No: 318/UN16.08.WD1/PP/2015 Sebelum turun kelapangan peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar wawancara yang disesuaikan dengan dengan tujuan penelitian sehingga masalah peneliti dapat terjawab dan telah dilakukan seminar proposal pada hari rabu 04 februari 2015 pukul 11.00 WIB di ruang sidang Jurusan Ilmu Politik Dengan SK Sekretaris Jurusan Ilmu Politik No: UN 16.09/IP/2015 yang di terbitkan pada tanggal 2 februari Tahun 2015 pada tanggal 10 Maret Tahun 2015 peneliti baru melakukan turun lapangan yang ditandai dengan rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL.) Kata padang No: 070/03537/kesbang.pol/2015.

Pada tanggal pada tanggal 11 maret peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan surat izin rekomendasi dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung No: 300/01trantip/2015. Setelah menunggu begitu lama peneliti akhirnya mendapatkan surat izintersebut pada tanggal 1 April Tahun 2015 dan peneliti mulai aktif melakukan proses

wawancara dengan masyarakat Bungus Teluk Kabung Yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Padang pada putaran pertama pada tanggal 30 oktober Tahun 2013 dan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang putaran keduanya pada tanggal 5 Maret Tahun 2014.

Pada tanggal 6 April Tahun 2015 peneliti berlanjut Kekelurahan Bungus Timur mewawancarai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Pada Tahun 2013 dan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2014 yang kemaren dengan begitu sulitnya menemukan informan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang pada putaran pertama dan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang pada putaran kedua dan terakhirnya peneliti menemukan salah satu informan pada pukul jam 12.00 wib.

Setelah peneliti menemukan informan dan melakukan istirahat dan melanjutkan mencari informan dan menemukan informannya pada pukul 16.00 wib setelah selesai mewawancarai informan melanjutkan pencarian informan berikutnya dalam keadaan mencari tidak ditemukan juga jam sedang menunjukkan pukul 18.00 wib akhirnya peneliti memutuskan untuk pulang kekontrakan atau kos.

Pada tanggal 8 April Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitian ke lokasi penelitian untuk mewawancarai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang dan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran keduanya. Pada hari ini peneliti menemukan informannya pada sore harinya pada pukul 17.00 wib. Dan menemukan informan keduanya menjelang adzan magrib pada pukul 18.00 wib.

Pada tanggal 9 April Tahun 2015 peneliti melanjutkan mencari informannya dan menemukan informannya pada pukul 13.15 wib dan melanjutkan informan berikutnya pada

pukul 15.40 wib setelah wawancara peneliti melanjutkan pencarian informanya dan menemukannya pada pukul 17.30 setelah selesai akhirnya peneliti mencoba melanjutkan pencarian informanya dan tidak menemukan informannya karena hari terlalu sore dan memutuskan pulang ke padang setelah sholat magrib.

Pada tanggal 15 April Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitiannya untuk mewawancarai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Pada Tahun 2013 dan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua pada Tahun 2014 kemaren, pada hari ini peneliti hanya mendapatkan satu informan saja yaitu pukul 16.06 wib

Kemudian peneliti melanjutkan penelitiannya untuk mewawancarai lagi masyarakat Bungus Teluk Kabung yang menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua pada tanggal 20 April Tahun 2015 hari ini peneliti menemukan informan pertamanya pada pukul 12.00 wib. Dan melanjutkan mencarinya dan menemukan pukul 14.00 wib dan dan menemukan informan berikutnya pada pukul 16.40 wib selanjutnya informan selanjutnya pada pukul 17.50 wib.

Pada tanggal 27 April Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitian kelokasi penelitian dan memulai wawancara pada pukul 10.11 wib selanjutnya penelitian melanjutkan mencari informanya dan menemukan informan peneliti pada pukul 14.21 wib dan berakhir pada pukul 16.30 setelah menemukan akhirnya peneliti akan melanjutkan penelitian esok harinya.

Kemudian Pada tanggal 28 April Tahun 2015 peneliti menyelesaikan mencari informan yang berkaitan data peneliti dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung tepatnya di kelurahan Teluk Kabung Selatan untuk mewawancarai untuk melengkapi data penelitian. Peneliti memulai wawancara pada pukul 10.00 wib pada hari ini

dan peneliti mengakhiri penelitiannya pada pukul 16.30 wib dan langsung pulang ke kontranya.

Pada tanggal 29 April Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitiannya mencaei informn yang menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua. Peneliti melakukan wawancara dengan infoman pertaamanya paada pukul 11.30 wib dan melanjutkan informan berikutnya pada pukul 12.30 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib dan peneliti langsung pulang ke kontarakanya.

Kemudiaan dilanjutkan pada 30 April Tahun 2015 peneleliti melanjutkan kembali mewawancarai masyarakat kecamatan bungus teluk kabung yang menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua peneliti memulai waawancara pada pukul 11.00 wib dan memukan informan berikutnya pada pukul 12.30 wib dan berakhir penelitian hari ini pada pukul 17.30 wib

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitiannya kelokasi penelitian pada tanggal 5 Mei Tahun 2015 kekantor Lurah sebagai kelengkapan data peneliti sebagi trianggulasi datanya sebagai pengecekan keberan yang didapat dilapangan yaitu wawancara dengan Sekretaris Lurah Bungus Timur pada pukul 11.11 wib setelah wawancara peneliti melanjutkan penelitiannya kekantor Lurah Bungus Selatan dan wawancara dengan lurahnya pada pukul 13.20 wib selanjutnya peneliti melanjutkan penelitiannya Kekantor Lurah Teluk Kabung Utara dan menunggu sekitar tiga puluh menit lamanya dan melakukan wawancara pada pukul 15.30 wib setelah wawancara peneliti tidak melanjutkan wawancara dengan lurah yang lain karna hari sudah terlalu sore akhirnya peneliti untuk pergi keKota Padang.

Pada tanggal 6 Mei Tahun2015peneliti melanjutkan penelitian kekantor Lurah Bungus Barat dan melakukan wawancara dengan lurahnya pada pukul 11.30 setelah selesai peneliti melanjutkan kekantor Camat Bungus Teluk Kabung bertemu dengan Lurah Teluk

Kabung Selatan pada pukul 14.15 wib dan setelah selesai peneliti bertemu lagi Dengan Lurah Teluk Kabung Tengah pada pukul 15.40 wib

Pada tanggal 12 Mei Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitiannya dengan mencari Ketua PPK Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan bertemu di dekat SD 02 Timbalun dan melakukan wawancara denganya pada pukul 14.20 wib

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitian ingin mewawancarai dengan Camat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dikarenakan camatnya sedang tidak ada di kantor beliau sedang di luar Kota akhirnya peneliti hanya meminta profil tentang Kecamatan Bungus Teluk Kabung di bagian humasnya untuk memfoto copy buku profil kecamatan Bungus Teluk Kabung dan peneliti akhirnya hanya mendapatkan profil tentang Kecamatan Bungus Teluk Kabung saja.

Akhirnya peneliti melanjutkan penelitian pada hari senin minggu berikutnya pada tanggal 25 Mei Tahun 2015 kebetulan pak camatnya sedang ada di kantor nya dan menunggu sekian lama dan akhirnya bertemu juga pada pukul 13.20 wib bertanya wawancara tentang apa maka peneliti menjawab tentang Partisipasi Politik masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan faktor apa yang membuat masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung tidak menggunakan hak pilihnya, dan pak camat menjawab kalau itu permasalahannya tidak bisa saya diwawancarai karna masalahnya saya belum ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ini saya dilantik menjadi camat sesudah mahyeldi dilantik menjadi walikota padang setelah itu baru saya di lantik menjadi camat di kecamatan Bungus Teluk Kabung ini oleh bapak walikota mahyeldi jadi persoalan yang mengenai Partisipasi Politik atau faktor penyebab menurunnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung alangkah baiknya saudara mewawancarai sekretaris kecamatan, dari pernyataan Pak Camat Bungus Teluk Kabung menyarankan wawancara diganti dengan sekretaris camat

saja dan peneliti bergegas mencari sekretaris camat pada pukul 13.40 wib akhirnya pada hari itu peneliti tidak dapat wawancara dengan sekretaris camatnya dikarenakan menunggu terlalu lama akhirnya peneliti memutuskan untuk pulang.

Pada hari Rabu tanggal 27 Mei Tahun 2015 peneliti melanjutkan penelitian langsung menuju Kantor Camat Bungus Teluk Kabung mencari Sekretaris Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada pukul 14.15 wib peneliti akhirnya dapat melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat Bungus Teluk Kabung.

#### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun.

Untuk memilih informan dalam hal ini yang lebih tepat dilakukan dengan sengaja (purposive sampling), maksudnya peneliti sendiri yang menentukan informan penelitiannya sebagai sumber data. Penggunaan teknik sampel ini mempunyai satu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini di antara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut kemudian peneliti memilih daerah atau kelompok-kelompok tertentu sebagai inti atau kunci sebagai sampel<sup>25</sup>. Maka yang menjadi kriteria informan adalah:

1. Berdomisili di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Terdaftar sebagai (DPT)
3. Menggunakan hak pilihnya pada pilkada Kota Padang pada putaran pertama Tahun 2013.

---

<sup>25</sup>Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, bumi aksara: jakarta. 2010. hlm: 58



4. Tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Padang pada putaran kedua pada Tahun 2014.

**Tabel 3.2**

**Berikut Daftar Nama Informan**

No	Nama informan	Nama Kelurahan
1.	Gelmon hendrik	Bungus timur
2.	Nasarudin chan	Bungus timur
3.	Yusril	Bungus timur
4.	Suwarjo	Bungus timur
5.	Firdaus	Bungus timur
6.	Jasril	Bungus barat
7.	Asril	Bungus barat
8.	Syafril	Bungus barat
9.	Zulkarnaini	Bungus barat
10.	jasril yusuf	Teluk kabung utara
11.	Sujarwo	Teluk kabung utara
12.	Arisman	Teluk kabung utara
13.	Syamsuardi	Teluk kabung utara
14.	Zulhardi	Teluk kabung utara
15.	Sukri	Teluk kabung tengah
16.	Hendr	Teluk kabung tengah
17.	Indra	Teluk kabung tengah
18.	Suroso	Bungus selatan
19.	Anwar	Bungus selatan
20.	Salim	Bungus selatan
21.	Syamsir	Bungus selatan
22.	Nasril	Bungus selatan
23.	Junaidi	Teluk kabung selatan
24.	Supardi	Teluk kabung selatan
25.	Andisal	Teluk kabung selatan
26.	Dodi	Teluk kabung selatan
27.	Asri;	Teluk kabung selatan

**E. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian<sup>26</sup>. Unit analisis dalam suatu penelitian sangatlah berguna untuk memfokuskan kajian yang akan diteliti, atau dengan kriteria-kriteria tertentu agar dapat menjawab masalah penelitian diakhir proses penelitian yang akan dilakukan nantinya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu masyarakat yang berdomisili ataupun tokoh masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain.

##### **a. Wawancara Mendalam**

Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini maupun yang akan datang. Wawancara yang dilakukan berkali-kali, digelar dalam lembar-lembaran yang mudah di baca. Data-data tersebut pada tahap ini tidak perlu dikelompokkan sesuai dengan dominandan atau sub-dominan observasi dan wawancara dapat di baca dengan mudah<sup>27</sup>.

##### **b. Dokumentasi**

Data dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang di amati bukan benda hidup tetapi benda mati<sup>28</sup>.

#### **G. Uji Pembuktian (Trianggulasi) Data**

---

<sup>26</sup>Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, PT Rineka cipta: jakarta. 1997, hlm: 121

<sup>27</sup>Burhan bungin, *analisi data penelitian kualitatif*, rajawali pers, jakarta, 2010, hlm. 96.

<sup>28</sup>Suharsimi arikunto, op.cit., hlm. 206

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses hasil yang diinginkan. Oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalannya baik seperti:

1. Umpamanya peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk mengumpulkan data.
2. Uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan harian observasi.
3. Hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelum dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber sumber lain.<sup>29</sup>

## **H. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik merupakan pandangan informan terhadap suatu hal sedangkan emik merupakan pandangan peneliti terhadap yang diteliti. Dalam menganalisa data sendiri dilakukan pula langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari wawancara yang sudah ditulis dalam catatan, dokumen atau arsip resmi, gambar dan foto sebagai dokumentasi.

---

<sup>29</sup>Burhan bungin,op.cit.,hal.331

- b. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Maksudnya adalah peneliti membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga diharapkan tidak bias.
- c. Menyajikan data dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan dengan memahaminya secara utuh.
- d. Membuat kesimpulan-kesimpulan.

## **I. Rancangan Struktur Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah penelitian berupa sekilas konsep kekuatan Politik serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam pemerintahan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Rumusan Masalah berangkat dari latar belakang mengapa Partisipasi Politik Masyarakat khususnya Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang cenderung menurun dari putaran pertama dan kedua pada pilkada Kota Padang 2014.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada sub pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan, digunakan sebagai referensi dan komparasi. Hal ini dilakukan sebagai verifikasi dan menambahkan kekurangan pada penelitian sebelumnya melalui perspektif partisipasi politik. Selanjutnya adalah kerangka teori dengan konsep-konsep yang disertai dengan gambar perihal Partisipasi Politik dari berbagai ahli. Kemudian skema.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti yang menentukan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan pendapat sendiri bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Unit analisis adalah lembaga tokoh masyarakat, landasan teori serta data yang ditemukan dilapangan dari informan.

#### **BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

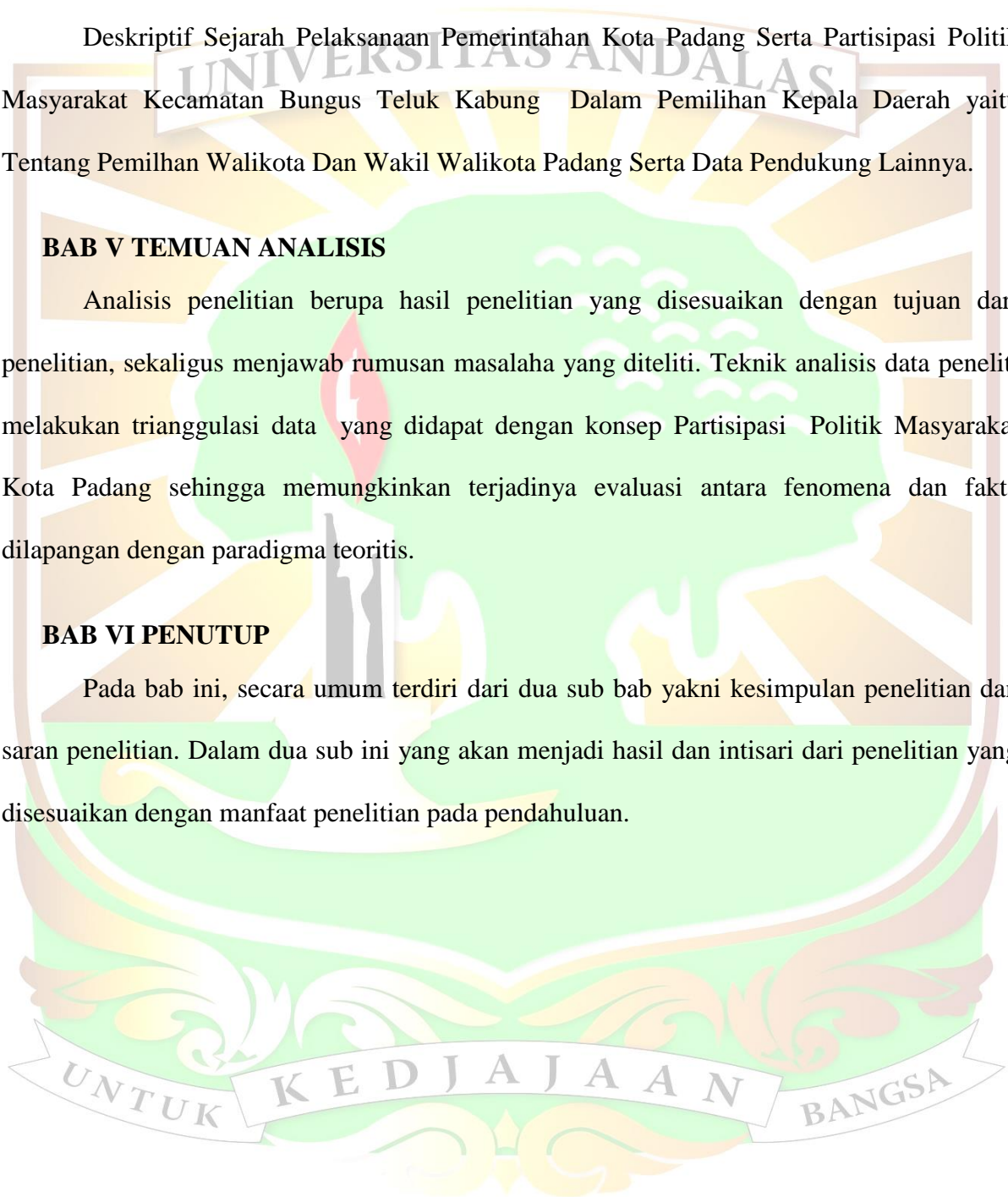
Deskriptif Sejarah Pelaksanaan Pemerintahan Kota Padang Serta Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu Tentang Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Serta Data Pendukung Lainnya.

#### **BAB V TEMUAN ANALISIS**

Analisis penelitian berupa hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis data peneliti melakukan triangulasi data yang didapat dengan konsep Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang sehingga memungkinkan terjadinya evaluasi antara fenomena dan fakta dilapangan dengan paradigma teoritis.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini, secara umum terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan penelitian dan saran penelitian. Dalam dua sub ini yang akan menjadi hasil dan intisari dari penelitian yang disesuaikan dengan manfaat penelitian pada pendahuluan.





UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA